

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Penelitian pertama dilakukan oleh Risda Asfina dan Ririn Ovilia (2016) dengan judul *“Be Proud Of Indonesian Cultural Heritage Richness And Be AlertOf Its Preservation Efforts In The Global World”*. Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya Indonesia harus dilestarikan karena berfungsi sebagai identitas bangsa. Mempertahankan keberadaan warisan budaya Indonesia adalah tanggung jawab masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Mereka harus mempertimbangkan beberapa upaya untuk melestarikan budaya Indonesia melalui media sosial berbasis komunitas *“LiveAndTell”*, proyek pelestarian digital, acara budaya dan filter budaya lain.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan yaitu terletak pada studi kasus dan objek studi yang dimana penulis menjadikan kerjasama Indonesia dan Perancis dalam dalam peran rumah budaya terhadap promosi Indonesia di Perancis, sedangkan dalam karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan ini yaitu mengenai pelestarian kebudayaan di kancah internasional melalui komunitas dengan alat promosi media social, sehingga keseluruhan kebudayaan Indonesia dapat diketahui masyarakat luas di seluruh dunia.

Penelitian kedua dilakukan oleh Retno Muljani and Emanuel Sunarto (2018) dengan judul *“Local Cultural Literacy And Its Promotion”*. Sanata Dharma University. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MWK memiliki peran untuk memperkenalkan literasi wayang sebagai bagian dari literasi budaya lokal ke kancah internasional. Nilai-nilai seperti kepahlawanan, kejujuran, kesetiaan, integritas harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari semua orang

yang dapat diperkenalkan, dibagikan, dan diajarkan melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal termasuk MWK dan museum lainnya. Sebagai museum milik pribadi, MWK membutuhkan dukungan seperti teknologi dan sumber daya manusia. Media promosi untuk menginformasikan dan mengundang pengunjung dapat digunakan.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan yaitu terletak pada studi kasus dan objek studi yang dimana penulis menjadikan kerjasama Indonesia dan Perancis dalam dalam peran rumah budaya terhadap promosi Indonesia di Perancis, sedangkan dalam karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan ini yaitu mengenai pelestarian kebudayaan di kancah internasional melalui museum MWK, sehingga keseluruhan kebudayaan Indonesia dapat diketahui masyarakat luas di seluruh dunia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Evi Steelyana (2012) dengan judul "*Batik, A Beautiful Cultural Heritage That Preserve Culture And Support Economic Development in Indonesia*". Binus University. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik bukan hanya ikon bangsa Indonesia tetapi juga warisan bangsa yang melestarikan budaya bangsa dan memberikan nilai ekonomi dengan memberikan beberapa efek berganda di sektor keuangan. Dengan distribusi batik ke luar negeri akan berpengaruh terhadap pelestarian budaya Indonesia di kancah internasional.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan yaitu terletak pada studi kasus dan objek studi yang dimana penulis menjadikan kerjasama Indonesia dan Perancis dalam dalam peran rumah budaya terhadap promosi Indonesia di Perancis, sedangkan dalam karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan ini yaitu mengenai pelestarian kebudayaan melalui industry Batik yang diperkenalkan dan dilestarikan pada kancah internasional.

Penelitian keempat dilakukan oleh Juniar Laraswanda Umagapi (2017) dengan judul "*The Rise of China-Indonesia Relationship: Soft Power, Resources, and Prospect in the*

Future". National Research University Higher School of Economics Moscow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran budaya akan menjadi alat bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama antar negara. Pelajar Indonesia atau kedutaan Indonesia di sana harus aktif untuk membuat banyak acara seperti Festival Indonesia dll. Untuk membuat orang Tionghoa di sana memiliki pengetahuan tentang Indonesia.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan yaitu terletak pada studi kasus dan objek studi yang dimana penulis menjadikan kerjasama Indonesia dan Perancis dalam dalam peran rumah budaya terhadap promosi Indonesia di Perancis, sedangkan dalam karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan ini yaitu kerjasama Indonesia-China yang berkaitan dengan pengenalan dan pelestarian budaya Indonesia di China dengan mengadakan festival bertemakan kebudayaan Indonesia.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yaza Azzahara Ulyana dan Mohd. Afandi Salleh (2018) dengan judul "*The Role Of Cultural Diplomacy : Indonesia Malaysia Relations*". Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan diplomasi budaya karena pendekatan *soft power* di masing-masing negara mampu memberikan dampak yang baik bagi hubungan Indonesia dan Malaysia terutama dalam mengurangi ketegangan di antara masyarakat atas beberapa masalah sosial di masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang datang ke Malaysia dan Indonesia untuk melanjutkan studi, jumlah wisatawan setiap tahun dan juga frekuensi pertunjukan seni Indonesia di Malaysia dan sebaliknya.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan yaitu terletak pada studi kasus dan objek studi yang dimana penulis menjadikan kerjasama Indonesia dan Perancis dalam dalam peran rumah budaya terhadap promosi Indonesia di Perancis, sedangkan dalam karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan ini yaitu kerjasama Indonesia-Malaysia dengan meningkatkan diplomasi budaya disertai pendekatan

soft power, maka akan berdampak baik bagi hubungan Indonesia dan Malaysia terutama dalam mengurangi ketegangan di antara masyarakat atas beberapa masalah sosial di masa lalu.

2.2 Kerangka Teoritis.

2.2.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri memungkinkan kita dalam rangka mengungkapkan dan memahami strategi nasional negara-negara terhadap lingkungan eksternal yang berperan dan memungkinkan untuk mengetahui alasan lemahnya peran negara lain dan karena tidak ada definisi khusus atau disepakati tentang konsep kebijakan luar negeri di kalangan ilmuwan politik pada umumnya, dan ilmu hubungan internasional atau studi internasional

Kebijakan luar negeri tidak selalu merupakan kegiatan negara-negara yang menempuh kebijakan netralitas atau stagnasi dan penutupan terhadap lingkungan eksternal tidak melakukan kegiatan terhadap lingkungan tersebut, dan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak selalu merupakan ekspresi dari kegiatan yang dilakukan oleh negara karena kegiatan eksternal dari negara tidak bertujuan secara keseluruhan untuk mengubah perilaku negara lain dalam mempertahankan status quo (Rabi, 2016). Selain itu, kebijakan luar negeri negara tidak hanya ditujukan kepada negara tetapi juga kepada semua aktor sistem internasional Konsep penggunaan logika ilmiah dalam kebijakan luar negeri berkisar pada tiga konsep utama: Kemampuan untuk memprediksi reaksi, diikuti oleh model gerakan memvisualisasikan hasil gerakan politik dan pengaruhnya di tingkat internal, regional, dan internasional (Angey et al., 2015).

Mengukur opini publik bertujuan untuk mengetahui tren nyata dalam menyiapkan keputusan tertentu Opini publik harus dipahami sebagai opini publik internal dan regional. Negara mengikuti orientasi tertentu dalam politik luar negerinya, mencetaknya untuk jangka waktu yang bisa lebih lama atau lebih pendek, sesuai dengan kesesuaian kepentingan

nasionalnya (Stephen Chan, 2017). Kecenderungan regional dapat menyimpang dari mengarahkan politik luar negeri negara sesuai dengan bidang geografisnya negara-negara yang mengarahkan politik luar negerinya pada bidang regionalnya dan tidak memperhatikan isu-isu yang jauh dari wilayahnya (Pujayanti, 2017)

Tren regional sesuai dengan tren global, dimana negara dalam hal ini mengarahkan kebijakan luar negerinya terhadap unit-unit internasional di luar wilayahnya (Yani & Lusiana, 2018). Terkadang pengambil keputusan berusaha mengejar orientasi kebijakan luar negeri yang berusaha membentuk pola hubungan internasional saat ini, dan antara orientasi kebijakan luar negeri yang berusaha mengubah pola hubungan internasional saat ini.

Hubungan internasional menjadi pola yang ideal dan dirasakan. Orientasi pengakuan atau perubahan dalam hubungan internasional saat ini tidak hanya menyimpang dari isu-isu regional, tetapi mencakup semua isu internasional di seluruh dunia. Kebijakan yang berupaya mengubah status quo dalam hubungan internasional adalah politik aliansi dan blok internasional. Pendekatan intervensionis berasal dari unit internasional yang berusaha mempengaruhi kebijakan unit internasional lainnya dan mengarahkan mereka untuk mempengaruhi komposisi (Dewi & Priadarsini, 2018). Pendekatan otoritas politik yang ada sering diadopsi oleh negara-negara besar dan negara-negara regional.

2.2.2 *Soft Power Diplomacy*

Konsep *soft power* adalah perubahan dramatis hubungan internasional dan, khususnya, pola-pola berbeda yang menjadi ciri interaksi di antara aktor-aktor internasional. Seperti yang ditunjukkan (Nye, 2008), pendekatan tradisional yang memandang hubungan antar negara hanya sebagai keseimbangan kekuatan berdasarkan kekuatan militer mereka tidak mencukupi saat ini. Dunia kontemporer lebih rumit dari masa lalu, di mana lebih banyak aktor terlibat dan berperan aktif dalam dinamika hubungan internasional. Munculnya aktor-aktor

baru di kancah internasional mengacu pada semakin berkembangnya peran aktor non-negara dalam tata kelola dunia (Nye, 2008).

Dalam konsepsi tradisional hubungan internasional, hanya negara dan organisasi internasional yang dianggap sebagai aktor unik di arena internasional, selama beberapa dekade terakhir, pemain lain telah muncul dan memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Pemain global baru adalah perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok teroris, dan dalam beberapa kasus, hanya individu. Munculnya aktor-aktor baru telah difasilitasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang didefinisikan oleh (Nye, 2008) sebagai “teknologi demokratisasi”, yang mengurangi biaya komunikasi, transportasi dan membuat teknologi (termasuk instrumen militer) lebih diakses dan lebih murah untuk orang biasa, dan sekarang dapat digunakan tidak hanya oleh negara.

Tren lain yang terkait erat dengan bertambahnya aktor di kancah internasional adalah semakin kompleksnya interaksi antar aktor dalam hubungan internasional dan persebaran kekuasaan. Menurut (Nye, 2008) menggambarkan kompleksitas seperti itu sebagai “permainan catur tiga dimensi”, dimana dalam hal kekuatan militer, dunia adalah unipolar (AS adalah negara adidaya yang unik), dalam masalah ekonomi, distribusi kekuatan adalah multipolar; dalam topik transnasional (perubahan iklim, kejahatan internasional, terorisme, penyebaran penyakit menular)

Lebih khusus lagi, jika dalam perselisihan militer satu pemain (AS) lebih berpengaruh daripada negara lain, di dimensi lain (ekonomi dan masalah transnasional), kekuasaan didistribusikan secara luas di antara negara-negara, dan tidak ada yang bisa menang di atas yang lain. Tren ketiga yang menjelaskan semakin besarnya peran *soft power* dalam dinamika internasional saat ini adalah tidak memadainya ketergantungan hanya pada kekuatan militer dalam mengelola hubungan internasional (Nye, 2008).

Faktor penting, yang digambarkan (Nye, 2008) sebagai elemen yang melemahkan kegunaan paksaan demi persuasi, adalah tingginya biaya yang terkait dengan penggunaan sarana militer di dunia saat ini. Nye Jr menyatakan bahwa ini adalah negara-negara demokrasi pasca-industri, sebagian besar berfokus pada kesejahteraan daripada kemuliaan militer, dan untuk negara-negara non-demokrasi, yang mungkin menghadapi kemunduran dalam kampanye militer, seperti pelarian investor dari negara mereka (Nye, 2008). Fenomena ini menjadi salah satu penyebabnya, yang menjelaskan kepentingan para pengambil keputusan, baik negara-negara demokratis maupun non-demokratis, dalam mengembangkan instrumen diplomasi publik dan dimensi soft power mereka untuk memperkuat posisinya di kancah internasional.

Tren tambahan di dunia kontemporer, yang membuat soft power relevan, adalah semakin pentingnya opini publik. Penyebaran demokrasi dan revolusi TI adalah dua faktor utama yang secara substansial berkontribusi dalam memperkuat peran opini publik baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Informasi di dunia kontemporer dapat ditransmisikan lebih cepat dan lebih murah daripada di masa lalu, berkat penemuan teknologi, yang telah mengurangi biaya komunikasi. Dalam konteks seperti itu, negara semakin memperhatikan opini publik, baik negaranya maupun negara lain. Seperti yang ditunjukkan (Nye, 2008) negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Meksiko dan Chili, sekarang penting dalam hubungan internasional, karena mereka memiliki pengaruh pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah negara-negara tersebut harus mempertimbangkan pendapat warganya, ketika mereka membuat keputusan, dan kebijakan yang tidak populer dapat merugikan mereka.

2.2.3 Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi budaya adalah salah satu cara paling berpengaruh dan signifikan dalam menerapkan strategi kebijakan luar negeri negara mana pun yang mengklaim peran penting dalam sistem hubungan internasional modern (Pajtinka, 2014). Ketika inovasi teknologi dan budaya menjadi tidak mungkin tanpa dukungan informasi dan informasi, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi global mendorong proses ini, mengotomatisasi fungsi dan operasi terkait, yang pada akhirnya membutuhkan digitalisasi dan digitalisasi proses dan mengubahnya (Ryan, 2015).

Lebih dari sebelumnya, diplomasi budaya menjadi medan pertempuran bagi pikiran, hati, dan dompet orang-orang di seluruh dunia. Di era konflik dan ketidakstabilan, peran budaya sebagai instrumen "*soft power*" tidak bisa diremehkan (Nye, 2008). Hal tersebut adalah sumber penting diplomasi yang digunakan untuk memajukan kepentingan negara untuk meningkatkan saling pengertian antara elit dan rakyat. Baik pemerintah maupun beberapa yayasan budaya menginvestasikan sangat sedikit uang dalam pengembangan kebijakan budaya. Namun, pada saat-saat kritis dalam sejarah, selama periode konflik dan konfrontasi, itu adalah budaya yang merupakan sumber inspirasi dan daya tarik yang kuat (Yani & Lusiana, 2018)

Kebijakan budaya di Prancis, secara tradisional didanai oleh negara. Konsep diplomasi budaya Prancis paling ringkas dicirikan oleh ungkapan kepala Institut Prancis di London: "budaya adalah politik" (*La culture, c'est la politique*). Pada saat yang sama, alih-alih istilah "diplomasi budaya", konsep "diplomasi pengaruh" yang lebih lugas dan lebih luas digunakan. Ciri khas model Prancis adalah peran koordinasi negara dalam diplomasi budaya dan tingkat pendanaan negara yang tinggi untuk program budaya. Prancis adalah satu-satunya negara Barat yang secara terpusat menyatukan semua instrumen diplomasi publik di bawah naungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan

Komunikasi. Instrumen terpenting diplomasi budaya Prancis meliputi (Yani & Lusiana, 2018):

1. Media internasional

Saluran *francophone* utama "*TV 5 Monde*", yang disiarkan 24 jam sehari, diterima di 200 negara di dunia, memiliki 165 juta pemirsa; *Radio France Internationale (RFI)*, yang mengudara sepanjang waktu pada gelombang pendek, menempati urutan ke-4 di antara stasiun radio di dunia, dengan sekitar 40 juta pendengar.

2. Jaringan internasional pusat budaya dan pendidikan "*Alliance Francaise*", berjumlah lebih dari 1000 organisasi di 146 negara. Kegiatan utama *Alliance Francaise* adalah mengajar bahasa Prancis dan mempromosikan negara-negara budaya berbahasa Prancis.

3. Institut Français (*Institut Français*) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 2011 untuk menyebarkan bahasa Prancis dan budaya berbahasa Prancis di dunia. Dengan demikian, model Prancis dicirikan oleh hubungan yang erat antara kebijakan luar negeri dan budaya, peran signifikan negara dalam kebijakan budaya, dan porsi pendanaan negara yang tinggi untuk program budaya.

2.3 Kerja Sama Indonesia dan Perancis

Perancis merupakan salah satu negara paling awal yang berhak dengan sistem pemerintahan Republik yang menjunjung slogan *liberte, egalite, dan fraternite*, yang berarti berturut-turut kebebasan atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (Udasmoro, 2012)

Ibu kota Perancis adalah Paris yang mencakup sekitar 100 km² daratan dengan populasi mencapai 2,2 juta orang. Hal tersebut telah menjadi daerah perkotaan terpadat di Uni Eropa. Bahasa resmi adalah bahasa Perancis yang juga digunakan oleh hampir 200 juta orang di

seluruh dunia baik sebagai bahasa pertama atau kedua mereka. Hal ini menjadikan bahasa Prancis menduduki peringkat ke-14 sebagai bahasa yang digunakan secara internasional (History of French, 2016).

2.3.1 Dimensi Sosial-Politik Perancis

Perancis adalah negara yang cukup beragam dan merupakan kombinasi dari banyak etnis dan ras, terdiri dari asal Perancis, serta pendatang dari Afrika dan Timur Tengah. Cukup sulit untuk mendefinisikan demografi etnis Prancis, karena terdapat larangan bagi Republik Perancis untuk membuat pembedaan antara warga negara berdasarkan etnis, ras, dan latar belakang agama mereka menurut undang-undang dari tahun 1872 (Nations Online, 2016).

Perancis adalah tipe pemerintahan presidensial dan konstitusional atau semi-presidensial. Prancis memiliki Presiden sekaligus Perdana Menteri. Presiden Perancis adalah Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Perancis adalah Élisabeth Borne. Baik Presiden dan Perdana Menteri memimpin cabang eksekutif. Sistem penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi beberapa tingkatan; bangsa, wilayah, departemen, arondisemen, kanton, dan komune. Perancis pada umumnya adalah sistem pemerintahan yang sangat terpusat, tetapi sejak undang-undang desentralisasi pada tahun 1982, lebih banyak kekuasaan didistribusikan ke wilayah dan komune. Perancis terdiri dari dua puluh dua wilayah dan dipimpin oleh prefek

Pemilihan umum adalah hak pilih universal, di mana orang memilih Presiden sebagai kepala negara mereka dan kemudian Presiden akan memilih Perdana Menteri. Pemilihan umum Perancis dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah pemilihan Presiden dan kedua adalah pemilihan parlemen (AFP, 2022). Pemilihan Presiden terdiri dari dua tahap pemungutan suara, putaran pertama adalah di mana semua pihak yang terlibat untuk mempromosikan kandidat mereka, kandidat yang mengamankan posisinya akan melanjutkan ke pemilihan putaran kedua

di mana suara terbanyak adalah Presiden (AFP, 2022). Pemilihan presiden diadakan setiap lima tahun sekali.

2.3.2 Dimensi Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi berperan sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi di suatu negara. Pelaksanaan dan praktik banyak kegiatan di Prancis tergantung pada ekonominya. Ekonomi Prancis berkembang dengan baik dengan banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di luar negeri belum lagi revolusi industrinya juga mempengaruhi pengaturan ekonomi dunia (France Government, 2021).

Contoh perusahaan Prancis adalah Total yang menjalankan bisnis berbasis minyak bumi, perusahaan otomotif seperti Renault dan Peugeot. Banyak *brand fashion* ternama yang berasal dari Prancis, seperti Louis Vuitton, Dior, dan Givenchy. Jaringan hotel dari Prancis juga mencakup banyak tempat di dunia seperti, Meridien, dan jaringan Sheraton Hotel. ERAMET juga salah satu grup pertambangan besar Prancis, salah satu proyeknya bernama Weda bay Nickel yang beroperasi di Indonesia.

2.3.3 Warisan Budaya Prancis

Prancis adalah negara yang memiliki warisan budaya yang luar biasa. Di Prancis, ada sekitar 40.000 monumen yang dilestarikan, 38 situs budaya yang terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO, dan sekitar 8.000 museum. Pemerintah Prancis memberikan dukungan yang cukup besar kepada seniman, restorasi bangunan bersejarah dan museum dengan dukungan yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Prancis (Bullen et al., 2021).

Berbicara tentang Prancis, kebanyakan orang sering mengasosiasikannya dengan Paris yang merupakan pusat *fashion*, masakan, seni, dan arsitektur. Namun, kawasan di luar kota lampu menawarkan beragam budaya. Prancis tidak hanya dikenal karena cita rasa seninya. Bahasa Prancis adalah bahasa mayoritas yang digunakan dan berbicara di Prancis oleh hampir

88 persen penduduknya, bahasa Jerman berbicara oleh 3% penduduknya, sedangkan bahasa lain yang berbicara adalah Flemish, Italia, Basque, Catalan, Breton dan juga Bahasa Arab (Grenet & Hottin, 2007).

Bahasa merupakan salah satu produk budaya yang dapat membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Bahasa Perancis memang rumit terutama bagi seseorang yang baru pertama kali mempelajarinya. Bahasa Perancis lisan dan tulisan berbeda. Lisan dan cerita rakyat mendominasi Perancis pra modern, dan merupakan awal dari perkembangan sastra tertulis Perancis. Sastra Perancis diakui sebagai salah satu tradisi terbesar di dunia (Collot, 2020). Terdapat banyak penulis yang melahirkan tulisan-tulisan terkenal, misalnya, Voltaire, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, dan banyak penulis terkemuka lainnya yang lahir dan tinggal di Perancis. Kebudayaan Prancis pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan seni dan ilmu pengetahuan.

2.3.4 Hubungan Bilateral Perancis-Indonesia

Perancis memandang Indonesia sebagai salah satu mesin utama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki nilai-nilai yang sama seperti demokrasi dan hak asasi manusia serta tatanan internasional yang setara dan transparan, yang dikendalikan oleh supremasi hukum

Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan singkat mengenai hubungan Perancis dan Indonesia yang menjadi pengantar dalam analisis selanjutnya tentang diplomasi budaya Perancis di Indonesia. Penjelasan hubungan bilateral Perancis-Indonesia akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Perancis memandang Indonesia sebagai mitra untuk kepentingan tertentu yang dipegang Perancis di era modern ini.

2.3.4.1 Selama Masa Penjajahan

Perancis dikenal sebagai salah satu imperium yang menyebarkan koloninya ke seluruh dunia. Perancis, seperti negara-negara Eropa lainnya memperluas kekuasaan mereka ke seluruh

dunia, Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, sehingga terdapat hubungan tidak langsung antara Perancis dan Indonesia pada masa penjajahan di mana Belanda pernah memerintah (Camroux & Srikandini, 2013).

Selama perang Napoleon, Belanda jatuh dan menjadi anggota Kekaisaran Perancis, sehingga kepemilikannya atas Hindia Timur juga berada di bawah Prancis. Indonesia termasuk ke dalam Kerajaan Perancis dalam waktu yang singkat, yaitu antara tahun 1806 sampai dengan tahun 1811. Perancis menerapkan pengaruh politiknya di bawah pemerintahan Belanda, terutama pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dengan membangun sebuah gedung yang sekarang menjadi gedung Kementerian Keuangan yang mengekspos gaya Kekaisaran Prancis (Fathimah, 2018). Tidak hanya dalam cara pemerintahan Belanda yang memberikan hubungan tidak langsung antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga revolusi Prancis dan sistem republik menginspirasi gerakan nasionalis Indonesia pada awal abad 20-an.

Sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh model Perancis melalui perantara Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sejarah, Perancis dan Indonesia sudah terlibat dalam hubungan tertentu, meskipun tidak kontak langsung, tetapi memberikan landasan dasar hubungan bilateral kemudian antara Perancis dan Indonesia (Fathimah, 2018). Hubungan bilateral resmi dimulai tidak tepat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hubungan diplomatik resmi antara Prancis dan Indonesia dimulai pada tahun 1951

2.3.4.2 Hubungan Bilateral Perancis-Indonesia

Hubungan bilateral Prancis dan Indonesia merupakan bagian dari skema hubungan multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prancis dan Indonesia juga merupakan bagian dari G-20 dalam hal ekonomi, serta dalam *Asia-Europe Meeting (ASEM)*. Selanjutnya, kedua negara mengirimkan pasukannya ke Lebanon dan bahu membahu dalam *Bali Road Map*.

Banyaknya event internasional lainnya menjadi peluang bagi Prancis dan Indonesia untuk memiliki apresiasi dan evaluasi yang sama atas tanggung jawab mereka demi dunia.

Pada tahun 2020 merupakan peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia – Prancis. Hubungan bilateral antara Prancis – Indonesia yang terjalin sejak September 1950 terus menunjukkan peningkatan, yang ditunjukkan melalui kerja sama di berbagai sektor. Momentum hubungan bilateral ditandai dengan saling kunjung antara pejabat kedua negara dalam kerangka bilateral dan multilateral, serta sikap saling mendukung terkait pencalonan keanggotaan kedua negara di berbagai lembaga organisasi internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Pada Maret 2017, Presiden François Hollande mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerja sama bilateral lebih lanjut antara kedua negara. Kedua pemimpin menyepakati beberapa kerjasama di bidang ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, pembangunan kota berkelanjutan, energi, pertahanan, dan proyek infrastruktur (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Belakangan, Presiden Joko Widodo juga telah bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron dalam acara *G20 Leaders' Retreat* pada Juli 2018 di Hamburg, Jerman.

2.4 Rumah Budaya Indonesia

“Rumah Budaya” dulunya merupakan institusi kunci untuk kegiatan budaya dan untuk implementasi kebijakan budaya negara di semua negara sosialis. Pada tahun-tahun pasca-sosialis “Rumah Budaya” mengalami krisis ekonomi dan simbolis yang mendalam, dengan banyak dari mereka akhirnya ditutup. Baru belakangan ini ada tanda-tanda reorientasi misi dan program “Rumah Budaya”.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menentukan fungsi dan makna baru dari lembaga-lembaga ini bagi masyarakat yang mereka layani. Proyek ini didasarkan pada hipotesis bahwa “Rumah Budaya” tidak lagi menarik bagi sebagian komunitas lokal, yang lebih tertarik pada bentuk rekreasi dan ekspresi diri yang kreatif (seringkali komersial). Namun, dalam banyak

kasus “Rumah Budaya” terus memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, khususnya, seperti yang mungkin didalilkan, di tempat-tempat yang kurang sentral (di daerah pedesaan) dan di antara orang-orang yang kurang mampu. .

Peneliti akan menyelidiki jaringan sosial karyawan dan pengunjung "Rumah Budaya" dan menganalisis siapa yang menggunakan lembaga-lembaga ini dan untuk tujuan apa. Pada saat yang sama, penelitian akan mengungkapkan siapa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan, dan mungkin mengungkapkan ketidaksesuaian struktural antara konsep dan target "Rumah Budaya" dan kinerja aktualnya dalam lingkungan sosial yang berubah. Sebagai hasil terapan dari proyek ini, peneliti akan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ke “Rumah Budaya” masing-masing, sehingga yang terakhir dan otoritas lokal dapat menggunakannya untuk pekerjaan di masa depan. Setiap daerah memiliki berbagai macam ciri khas budaya lokal yang berbeda-beda, seperti rumah adat yang sampai saat ini masih dijaga keasliannya, pakaian adat, alat musik, tarian, serta adat istiadat yang masih dianut sampai saat ini oleh warga lokal.” Rumah Budaya Indonesia berlokasi di dekat kantor KBRI Paris dimana Rumah Budaya tersebut dijadikan seperti museum dan digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk mempelajari berbagai macam kesenian dari Indonesia, seperti gamelan, angklung, tari tradisional dan lain sebagainya. Rumah ini dibentuk secara khusus agar menyerupai rumah adat yang ada di Indonesia.”

Maka dari itu dalam jangka waktu 2013 hingga 2020, penulis ingin menganalisa apakah Rumah Budaya Indonesia dapat berfungsi sebagai alat promosi budaya Indonesia di Perancis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan Literatur Review dan Kerangka Teoritis yang sudah dijabarkan diatas, maka hipotesis adalah sebagai berikut:

“Dengan adanya program Rumah Budaya Indonesia, intensitas kerjasama Indonesia dan Perancis di bidang budaya, maka pemahaman masyarakat Perancis mengenai budaya Indonesia semakin meningkat”.

2.6 Verifikasi Variabel dan Indikator

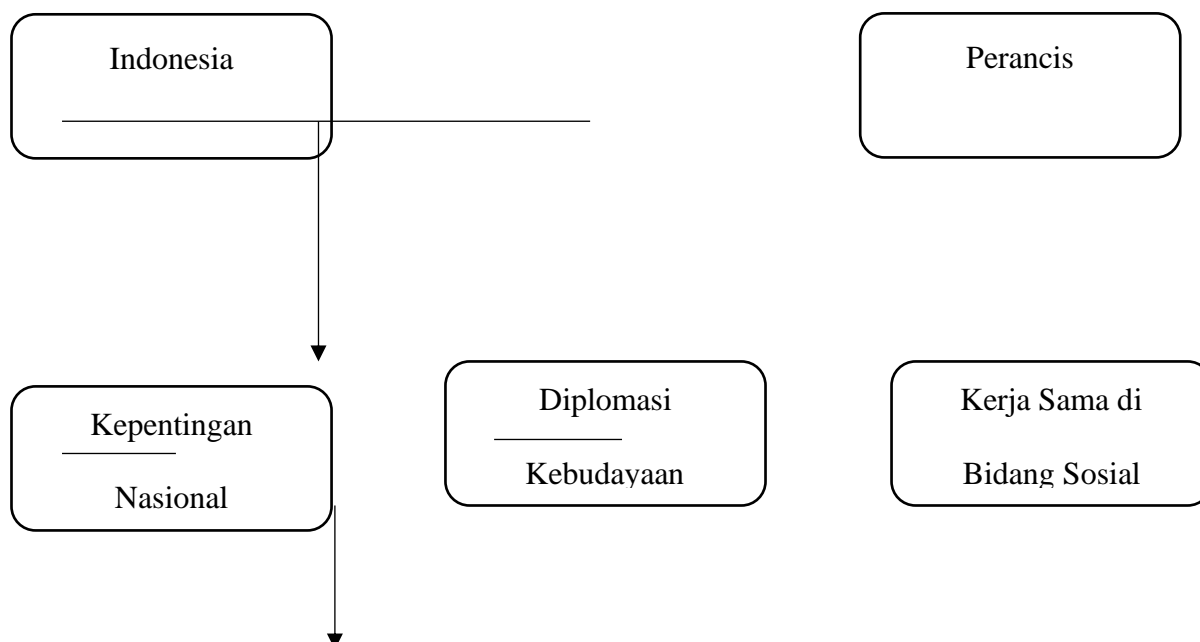
Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Diplomasi Kebudayaan	Penggunaan instrumen - instrumen kebudayaan untuk mempengaruhi publik asing	<i>Arts</i>	Pemerintah Indonesia mengadakan pertunjukan kesenian
		<i>Exhibitions</i>	Pemerintah Indonesia mengadakan pameran / <i>Exhibition</i>
		<i>Exchanges</i>	Pemerintah Indonesia mengadakan <i>Exchange</i> / pertukaran kebudayaan
		<i>Broadcasting</i>	Pemerintah Indonesia memanfaatkan media massa untuk memperanalkan kebudayaan Indonesia
		<i>Gifts</i>	Pemerintah Indonesia merancang souvenir atau cinderamata bagi publik sebagai simbol kebudayaan khas Indonesia
		<i>Listening and according respect</i>	Pemerintah Indonesia mendapat perhatian dari publik Prancis atas upaya memperkenalkan kebudayaan Indonesia

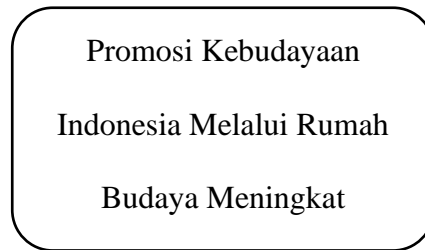
		<i>Promotion of ideas</i>	Pemerintah Indonesia mempromosikan ide dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia
		<i>Religious Diplomacy</i>	Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui nilai-nilai keagamaan

Sumber : Olah Data, 2022

2.7 Skema dan Alur Penelitian

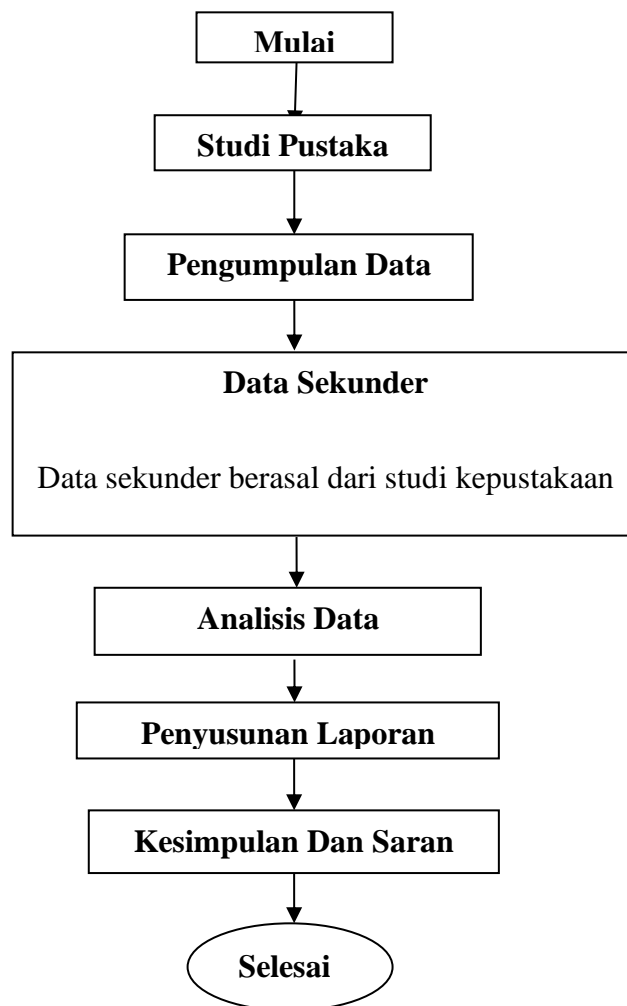
2.7.1 Skema





Sumber : Olah Data, 2020

2.7.2 Alur Penelitian



Sumber : Olah Data, 2022